

PENGAWASAN KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBANGUNAN DI DESA WENAM DISTRIK PIRIME KABUPATEN LANNY JAYA

Tundeki Wanembo¹
Ronny Gosal²
Frans Singkoh³

Abstrak

Penelitian Ini bermaksud untuk mengetahui pengawasan kepala kampung dalam pembangunan di kampung wenam distrik pirime kabupaten lanny jaya dilihat. Dari Tugas Pokok Fungsi Pengawasan Kepala Kampung Menurut dari mengemukakan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi, penyimpangan- penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pelaksanaan pembangunan menurut pembangunan mempunyai tiga sifat penting yaitu: 1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus 2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita itu harus terus menerus dan berlangsung dalam jangka panjang sehingga setiap pembangunan sarana fisik harus lebih diperhatikan dalam hal seperti pendanaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan, namun perlu juga kerjasama yang begitu erat sehingga tidak adanya keterlambatan dalam koordinasi dan komunikasi dari pemerintah kabupaten kepada kepala kampung yang diharapkan dalam pelaksanaan program pembangunan hal yang dihadapi di lapangan.

Kata Kunci: Pengawasan Kepala Kampung, Dalam Pembangunan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan di desa tentu harus mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa sebagai pelayanan masyarakat, harus memiliki kemampuan yang optimal, serta masyarakat harus dapat mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Dengan demikian pemerintahan desa dan masyarakatnya harus saling mendukung, dimana pemerintah desa sebagai penggerak partisipasi, maka masyarakat juga sebagai pemberi kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh HAW Widjaya (2008) bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub system dan system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan ruma tangga daerah, pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketenterman dan ketertiban sesuai dengan kepmendagri No 27 tahun 2005 maka pemerintah desa (kepala desadan perangkatnya) adalah penyelenggara/penanggung jawab utama dibidang pemerintahan desa. Pembangunan desa dan kemasyarakatan. Hal ini dipertegas pula dalam UUNo 12 tahun 2008 Bab Xi pasal 202 tentang pemerintahan desa bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Selain aturan yang mengatur tentang desa maka pemerintah Daerah Kabupaten Lanny jaya juga mengatur tentang Desa Berdasarkan perda No 5 tahun 2010 dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan desa atau

dengan sebutan nama lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat desa sudah lama dilaksanakan, namun hasilnya belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat desa. Buktinya ada desa-desa yang sudah berkembang menjadi desa yang mandiri, namun ada desa-desa yang melaksanakan pembangunannya masih bersifat stagnan dari tahun ketahun belum dapat berkembang secara nyata.

Begitu pula dengan pelaksanaan pembangunan di daerah papua lebih khusus lagi di desa wenam kecamatan pirime kabupaten lanny jaya program pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal, pemberian bantuan untuk kepentingan pembangunan desa belum mampu untuk meberdayakan masyarakat. Walaupun di wilayah desa wenam masih terdapat sumberdaya alam yang melimpah ruan namun kekayaan alam yang tersedia tersebut belum dapat dirasakan secara nyata oleh parah penduduknya. Pada hal disekolah secara intentif, maka sumberdaya alam yang tersedia akan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Apabila aparat pemerintah desamemiliki kualitas dan kemampuan yang optimal dalam pembangunan, maka akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan yang baik sehingga

dapat kehidupan yang harmonis demi kepentingan masyarakat desa. Dalam mendukung kemampuan yang optimal tersebut bagi pemerintah desa khususnya dalam mengelola potensi sumberdaya alam.

Sikap mental masyarakat dalam pembangunan harus dibangun dan dioptimalkan agar supaya dengan pembangunan sikap mental maka masyarakat akan dapat berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan desanya. Pemberian dana bantuan yang optimal kepada desa maka akan mendorong kemampuan yang optimal bagi pemerintah desa dan rakyat desa dalam membangun desanya secara berkesinambungan sehingga diharapkan desa yang ada di wilayah distrik pirime desa wenam akan menjadi desa yang mampu memproduksi, lubang pangan, menjadi ketaatan social serta menjadi desa swasebada.

Tinjauan Pustaka **Konsep Pengawasan**

Seperti yang telah disebutkan ini bahwa pengawasan (controlling) adalah salah satu fungsi organik manajemen. Sebagai fungsi manajemen, pengawasan mengandung pengertian sebagai usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Sebagai fungsi manajemen, pengawasan merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan fungsi-fungsi organisasi akan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan, intruksi rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Singkatannya pengawasan merupakan

proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sarana.

(George Terry 1986:165) mengemukakan bahwa pengawasan dapat dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan menkoreksi, penyimpangan- penyimpangan peting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas aktivitas yang direncanakan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengawasan terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal, yaitu :

Mengukur hasil pekerjaan, Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan apabila perdedaan dan Mengoreksi penimbangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Dengan kata lain (George Terry 1986:167) mengemukakan bahwa pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan sebagai berikut:

Mencari keterangan tentang apa yang sedang dilaksanakan

Membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan yang menyebabkan timbul tindakan. Penjetujui hasil - hasil atau menolak hasil - hasil dalam kasus mana perlu ditambahkan penambahan tindakan-tindakan. Berdasarkan pada hakekat pengertian pengawasan yang ada mengemukakan bahwa tujuan dari pada pengawasan adalah:

Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya. Apabila terdapat penyimpangan maka dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan. Berdasarkan uraian-uraian diatas bahwa dapat dilihat bahwa sebagai salah satu bagian dari

proses manajemen, pengawasan bukanlah suatu tindakan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan merupakan aktivitas manajemen yang dimaksudkan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan – penyimpangan atau kesalahan – kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan dan kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan – tindakan korektif. Sebagai salah satu bagian dari proses manajemen pengawasan dapat dilakukan sebelum maupun setelah adanya pelaksanaan kegiatan. pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan yaitu pemantauan, pengamatan, pemeriksaan, pengukuran terhadap kerja aparatur pemerintah disebut pengawasan prefektif. Pengawasan prefektif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. sedangkan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan kegiatan/rencana disebut pengawasan represif. Pengawasan represif ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Kualitas Pelayanan Menurut Poer wadarminta W Y. S dalam kamus umum Bahasa Indonesia diterangkan bahwa, 'Kualitas adalah baik buruknya sesuatu. Jadi apabila mengikuti secara dalam disiplin mengenai pengertian ini, maka penggunaan istilah ini haruslah kualitas pelayanan baik kualitas buruk, kualitas tinggi dan kualitas renda.

Artinya itu harus dilengkapi lagi, tidak tingal mempergunakan kualitas saja. Secara umum kualitas adalah tinggkat baik buruknya sesuatu

menurut Gosth dan davis (dalam Tjiptono 1996 : 56) kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan produk, jasa manusia dan lingkungan yang memenuhi melebihi harapan. Menurut Feigenbaun (1993:10) kualitas adalah sesuatu yang diputuskan oleh pelanggan sedangkan menurut (Tunggal 1993 12) kualitas adalah totalitas dari bentuk dan karakteristik pelayanan suatu produk atau jasa yang tergantung kepada kemampuannya untuk memutuskan keputusan yang dinyatakannya.

Sementara itu saputra (dalam majalaia manajemen No 171: 5) kualitas pelayanan adalah jasa atau barang yang menurut pelanggan memenuhi kriteria yang ia butukan harapan mereka dan memberikan satisficationia juga mengatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan sikap,keyakinan nilai-nilai budaya atau kebiasaan hidup organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan jenis jasa produk yang konsisten sepanjang hayatnya.

Pengertian ini jelas bahwa menggunakan istilah kualitas pelayanan itu seharusnya dilengkapi dengan sifat-sifat tertentu agar jadi pemimpin yang baik, yaitu Vitalitas, Integgensia, Humanitas, Moralitas, dan lain-lain. Jadi apabila kualitas ini tidak dilengkapi dengan sifat-sifat tersebut diatas maka, muncul lah hakekat pengertian berarti tidak tepat dan jalas pemakaiannya selanjutnya menurut Prof. Drs. A.L. Tampi dalam makalah''(1983:23) peningkatan kualitas pelayanan manusia di Indonesia dapat diartikan dengan mutu atau juga dalam bahasa praktis disamakan dengan kata berbobot nilai dan lain-lain berangkat dari pengertian ini dapat diperjelaskan lagi dengan hal-hal menyakut derajat kerdasan derajat kemampuan atau kualitas pelayanan

yang dilengkapi dengan vitalitas (keunggulan), kelebihan intelegensi, berdidak humanitas dan dengan bersifat moralitas dalam pengertian teknis operasional adalah mutu dari orang atau orang-orang yang memiliki keahlian kerampilan dan berpadangan luas serta berkemauan untuk maju dan berhasil (sukses).

Dengan demikian dapat dikaitkan bahwa kualitas pelayanan manusia itu adalah suatu ukuran tentang derajat profesionalisme derajat kecerdasan derajat keterampilan derajat kemauan dan kemampuan derajat kebaikan dan kejujuran yang dipergunakan bagi pembangunan di Indonesia seutuhnya yang diimpelmentasikan bentuk daya juang dan pengabdian.

Goettsch dan Davis dalam Tjiptono (1997:234) teoritis mengatakan kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan proses dan lingkungan yang memenuhi harapan juran dalam Mauludin (2003:78) teoritis kualitas pelayanan merujuk pada perwujudan atau gambaran-gambaran hasil-hasil yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan dalam membrikan kepuasan lebih lanjut menurut juran bahwa dua hal yang berhubungan dengan kualitas pelayanan harus mempunyai keistimewaan dan bebas defisiensi parasuraman megemukakan bahwa kualitas pelayanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat suatu pelayanan baik sedangkan Gronroos et al dalam Mauludin (2003:89) mendefinisikan kualitas pelayanan (service quality)

Teoritis sebagai hasil persepsi dari perbandingan antara pelanggan dengan kinerja actual pelayanan dengan

kata lain ada dua factor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu expected service dan perceived service apabila jasa yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal jika kualitas jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan maka kualitas jasa dipersiapkan buruk atau tidak memuaskan (Mauludin H, 2003:211) teoritis dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyediaan jasa dalam memenuhi harapan pemakaiannya secara konsisten.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati system Negara Kesatuan Republik Indonesia (Amademen UU 12 Bab 1 Pasal 1 ayat 12 tentang pemerintahan Daerah tahun 2008)

P. J. Buman (1971) memberi pengertian tentang kepala Desa adalah suatu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling megenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha dapat dipengaruhi oleh hukum alam dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terhadap banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah social.

J.B.A.F. Mayor polak (1976:221) mengemukakan bahwa kepala desa mempunyai tiga ciri khas yaitu sifat

kekeluargaan diantara penduduk, sifat kolektif dalam pembagian tanah, sifat kesatuan ekonomis yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri.

Dipadang dari segi hukum ketatan negaraan menurut mariun (1969:321) kepala desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, adat teritorial yang berpemerintahan sendiri. Pembahasan mengenai kepala desa dapat ditinjau dari segi pemerintahan (ketatanegaraan) dan segi geografi.

Dari perintahan istilah kepala desa atau nama aslinya yang setingkat, merupakan kesatuan masyarakat hukum katohadikusumo (1975) kepala desa merupakan suatu kesatuan hokum meliputi suatu masyarakat yang bertempat tinggal suatu wilayah dan berhak mengadakan pemerintahan sendiri Apa yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum.

Maksudnya suatu masyarakat yang prilaku kehidupannyadiatur dan diurus menurut hukum tertentu. Masyarakat hukum adat berarti prilaku dan kehidupan masyarakat itu diatur oleh adat masyarakat yang terikat adat berdasarkan pertarian daerah atau kekerabatan disebut masyarakat genealogis, sedangkan bila masyarakat tersebut terikat daerah tertentu yang disebut masyarakat teritorial.

Dari segi geografi menurut Bintarto (1985) kepala desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, social ekonomi, politik dan kultural diwilayah dalam hubungan dan penguaru timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Lebih lanjut dikatakan oleh Bintarto (1985:213) dalam pengertian tradisional kepala desa ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepala desa dan masyarakat memiliki hubunganyang erat dengan lingkungan alam
- b. Iklim dan cuaca mempunyai penguaru besar terhadap petani sehingga warga desa banyak tergantung pada perubahan musim,
- c. Keluarga desa merupakan suatu unit sosal dan unit kerja
- d. Jumlah penduduk dan luas wilayah desa tidak begitu besar
- e. Kegiatan ekonomi agraris
- f. masyarakat desa merupakan suatu penguyuban (kekeluargaan) atau (gemeinschaft)
- g. Proses social didesa umumnya berjalan lambat
- h. Warga desa pada umum berpendidikan rendah.

Dalam pengertian saat ini kepala desa ditandai oleh penguaru terbukanya hubungan langsung dengan kepala desa terdekat dengan kota, serta secara tidak langsung sebagai akibat terbukanya hubungan dengan luar. Keadaan ini mengakibatkan terbukanya pikiran warga desa sehingga masalah pendidikan, ekonomi, dan pengembangan desa mendapat tanggapan dan berjalan lancer

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut masri singarimbun (1982:5) bertuyuan mendeskripsikan secaraterperinci tentang fenomena sosial tertentu dalam penelitian ini, menurut bungin (2004), penulis tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta fakta penelitian dilapangan. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan mengenalisis peranan

kendala, solusi dan strategi pengembangan peranan pengawasan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penelitian ini, informan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Wenam
- 2) Sekretaris Kepala Desa Wenam
- 3) Staf perangkat Desa Wenam
- 4) Masyarakat

Hasil Penelitian

Pemerintah Kampung Wenam Kampung adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Lanny Jaya,) dengan adanya pengaturan desa tersebut diharapkan pemerintah desa bersama masyarakat secara bersama-sama menciptakan kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup : keberadaan lembaga perwakilan desa atau badan perwakilan desa (BPD) sebagai bentuk miniatur DPRD di tingkat Kota maupun Kabupaten. Kewenangan ini berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa yang selama ini tidak memiliki "lawan" atau yang mengontrol yaitu Pemerintah Desa selain itu keberadaan lembaga ini akan memengaruhi perubahan suasana dalam proses pemerintahan di Desa.

Keberadaan BPD secara otomatis akan mempengaruhi kinerja pemerintahan Desa, begitu pula kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan Desa dalam hal ini kepada Desa juga akan berbeda dari sebelumnya namun yang tidak kalah pentingnya adalah masalah keuangan desa (UU no 6 tahun 2014 pasal 71) yang mengatur tentang pendapatan desa, yaitu berdasarkan pendapatan asil

desa (hasil usaha desa, hasil swadaya, dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah) kemudian bantuan dari pemerintah kabupaten berupa bagian yang diperoleh pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten, selain itu bantuan dari pemerintah dan pemerintah Propinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintahan desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya pemerintahan Megina Wanimbo, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan Otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan keputusan bagi masyarakat yang memerlukan karena, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan dilapangan harus di dukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hal di atas ini atas menunjukan salah satu unsur penting yang berperan disini adalah perlu adanya pengawasan desa itu sendiri sebab itu desa dituntut mempunyai kemampuan agar dapat menyelenggarakan program-program pembangunan secara meluas dan efektif dengan perkataan lain bahwa penyelenggaraan program administrasi pembangunan secara baik setidaknya tidaknya dapat dilakukan, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga mereka akan turut pula mendukung usaha-usaha pemerintah dalam melaksanakan

pembangunan sarana fisik Kampung Wenam.

Dalam pelaksanaan pembangunan sarana fisik juga sangat membutuhkan adanya rasa kepersayaan kepada masyarakat serta dukungan atau dorongan yang di berikan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa adanya dukungan dari masyarakat merupakan elemen penting dalam mengembangkan pengetahuan masyarakat dalam hal pembangunan sarana fisik sehingga dengan adanya dukungan atau dorongan dari masyarakat kepada pemerintah program yang akan dilaksanakan bias beryalan dengan semestinya.

Untuk mengarakan masyarakat dalam dukungan atau dorongan terhadap pembangunan, di perlukan adanya unsur /tenaga penggerak yang mampu dan menggerakkan dan mengarahkan kemampuan serta kepercayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang akan dilaksanakan, maka dalam hal ini desa sebagai kepala desa memegang peran yang menentukan pembangunan desa yang melaksanakan pemerintah dan pembangunan yang akan dilaksanakan, ia harus mampu mengembangkan tugas yang di berikan kepadanya yang saling kait mengkait.

Jadi dari hasil pengamatan penulis dari obserpasi pada saat kujungan ke lokasi-lokasi penelitian baik langsung lapangan beberra tempat melihat kujungan dalam keadaan santai oleh beberapa perangkat desa maupun toko masyarakat yang ada dan yang di damping oleh seorang aparat desa ini merupakan adanya keserasian akan makna pembangunan dalam usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya

tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berariti memmpukan atau mendirikan mereka, dimulai dengan prosesnya pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat diharapkan agar dapat memacu partisipasi masyarakat proses pembangnan itu sendiri.

Semua ini merupakan hal gerakan kea rah kemajuan unuk menjalin eratkaitanya dengan pembagunan: hal ini menunjukan bahwa desa wenam dalam proses pelaksanaan pembangunan sarana fisik dengan cara selalu melibatkan masyarakat dalam setiap ada kegiatan pembangunan keputusan, sehingga masyarakat desa ini rasa kekeluargaan dan jawa kebersamaannya masih erat terjalin.

Dalam hala ini desa beserta para perangkatnya yang laintelah menyikapi hal ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Desa pun selalu bersikap transparan baik masa pembanguna maupun masalah bantuan yang di dapatkan dari pemerintah kabupaten lanny jaya hanpir semua bantuan yang masuk kelolah secara demokratis .

Namun dalam hal ini ada beberapa program yang telah di laksanakan,yang sementara dilaksanakan, dan yang belum di laksanakan oleh pemerintah desa wenan dari tahun 2015 sampai 2017 seperti yang telah di kemukakan dari hasil wawancara kepada informan ditas jaitu.

Program pembangunan pembuatan jalan raja penghubung Jalan renopasi dari desa ke jalan raja sampai kantor kecamatan telah selasai dilaksanakan program pembangunannya ini di laksanakan dari bulan desember 2015 sampai bulan januari 2017.

Program pembangunan saluran outlet antara Kelurahan desa wenan yang sampai saat ini program pembangunan masih adanya kebaikan atau masih dilaksanakan pembangunannya.

Program pembangunan saluran air atau selokan air di desa wenan yang dimana program pembangunan masih belum terlaksanakan sampai sekarang. Jadi walaupun kita ketau bersama kalo meliaht pengawasan desa dalam memberikan pembinaan serta melakukan pendekatan sesara langsung kepada masyarakat dalam menumbuh kebangkan kesadaran masyarakt, maka masyarakat akanmengetauhi pentinnya pembangunan terutama pembangunan sarana fisik yang telah dilaksanakan. Demikian juga dengan desa kirannya mampu mendengar atau mengelolah segala bentuk dukungan dan masukan apapun dari masyarakat sehingga desa sendiri akan memberikan hasil yang terbaik dari motivasi dan kepercayaan dari masyarakat.

Kesimpulan

a. Pengawasan desa dalam meningkatkan pembangunan sarana fisik telah berhasil sesuai dengan kemampuan desa dengan para perangkat desa yang ada di desa wenam baik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maupun kesadaran masyarakat juga untuk bersa-sama membantu program pemerintah desa wenam dalam membantu menciptakan pembangunan, ketercapaian kerja para prangkat desa yang efektif dan efisien, dan juga program-program pembangunan yang telah terlaksanakan sudah baik dan sesuai dengan yang diharapkan, naman masi ada saja keterlambatan

pencairan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di desa karena kurangnya kemampuan kepala kampung dalam memenets anggaran yang turun dari pemerintah.

- b. Kendala yang mempengaruhi pengawasan desa dalam meningkatkan pembangunan sarana fisik didesa wenam distrik pirime kabupaten lanny jaya adalah. Kepala kampung kurang melakukan pengawasan terhadap pembangunan di kampung wenam sehingga mengakibatkan keterlambatan pembangunan di kampung wena.
- c. Terbatasnya dan lambatnya bantuan pendanaan yang diberikan pemerintah kabupaten kepada desa wenam sehingga masih ada juga program-program yang belum terlaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Saran

- a. Pengawasan desa yang ada di desa wenam yang sudah baik harus tetap dipertahanka dan ditingkatkan lagi supaya menyadi lebih baik melalui penyelengarakan program-program pembangunan.
- b. Perlu adanya program-program kepala kampung kusunya dalam meningkatkan kemampuan kepala kampung sehingga bisa menghasilkan sumber daya kepala kampung yang berkualitas.
- c. Setiap pembangunan sarana fisik harus lebih diperhatikan dalam hal – halnya seperti pendanaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan, namun perlu juga kerja sama yang begitu erat sehingga tidak adanya keterlambatan dalam koordinasi dan komunikasi dari pemeritah kabupaten kepada desa apa yang di harapkan dalam pelaksanaan program pembangunan

akan berdaya guna dan berhasil guna
semua bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktik*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Lanny Jaya Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Dalam Angka Katolog BPS, Lanny jaya 2016.
- Bryant, A. dan White. 2009. *Managing Development in TheWorld*. Westview, Boulder, Colarado.
- F.J. Bouman 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali
- Fiman, A. dan Sirait. 2011. *Sumber daya Manusia Dalam Pembangunan Pradya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hadayaningrat, Soerwarno. 2009. *Adnistrasi Pemeririntahan Dalam Pembangunan Sosial*, CV Haji Masaagung , Jakarta.
- HAW, Widjaya. 2009. *Otonomi Desa Meeupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafidopersada.
- Mariun. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Martoryo. 2018. *Perencanaan Sumberdaya Manusia Cetakan Pertama*. Bandung: Bandar Maju.
- Moleong, J. 2000. *Metode Penelian Kualitatif Bandung*
- Penerbit. Bandung : Alfabeta.
- Nawawi, H. 2011. *Pengawelekat di Lingkungan Appratur Pemerintah*. Elangga Jakarta.
- Siagian,P. Sondang. 2014. *Adminsiasi Pembangunan*. Bumi Jakarta.
- Siagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. LAN Jakarta.
- Subagyo, Yoko.P. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Peraktek* . Jakarta: Ricka Cipt.
- Sukirna M.1985. *Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT Gramendia.
- Sutardjo, Karkohadikusumo. 1975. *Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : PT Gramedia.
- Suyana, Nana. 1995. *Metode Statiska*. Bandung: Tarsito Aditama.
- Teri, R. George. 1986. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokrowinoto. 1987. *Teori dan Strategi Pembangunan*. Jakarta: PT Rajawali Press
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
 - Keputusan Mentri dalam Negeri No 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
 - Perda kabupaten Lanny Jaya No. 5 tahun 2010 tentang Desa.
 - Majalah Manajemen No. 171, tahun 2001.
 - Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 tentang Distrik
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia

